

BAB IV

KEPENTINGAN PERTAHANAN INDONESIA

Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan bersifat semesta,¹ yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh.

Pertahanan Negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman.² Tujuan pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara mencakupi upaya untuk menjaga sistem ideologi negara dan sistem politik negara. Dalam menjaga sistem ideologi negara, upaya pertahanan negara diarahkan untuk mengawal dan mengamankan Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah bangsa Indonesia. Setiap usaha untuk mengganti ideologi Pancasila akan berhadapan dengan instrumen pertahanan negara yang setiap saat siap sedia membela dan mempertahankannya, sedangkan dalam menjaga sistem politik negara, upaya Pertahanan Negara diarahkan untuk mendukung terwujudnya pemerintahan negara yang demokratis, stabil, bersih, dan berwibawa serta mengandung tata nilai. Pemerintahan yang stabil, bersih dan berwibawa memungkinkan terselenggaranya pembangunan nasional dengan baik. Sebaliknya, pemerintahan yang tidak stabil tidak saja mengganggu kelancaran pembangunan nasional, bahkan dapat mengakibatkan masa depan Indonesia menjadi tidak menentu. Tata nilai bangsa Indonesia terangkum dalam semboyan *Bhinneka Tunggal Ika*, yaitu bangsa Indonesia yang menegara dalam wadah NKRI yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, hukum, hak asasi manusia dan lingkungan hidup serta bukan berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan. Setiap gangguan

¹ Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008* (Jakarta: Dephan RI, 2008), hal. 43

² *Ibid.*, hal. 44.

yang berdimensi SARA, demokrasi, HAM, dan tindakan perusakan lingkungan hidup juga menjadi urusan pertahanan negara.

Pertahanan negara diselenggarakan untuk mewujudkan kepentingan nasional. Kepentingan strategis pertahanan Indonesia merupakan bagian dari kepentingan nasional dalam menjamin tegaknya NKRI dengan segala kepentingannya. Pertahanan negara memiliki peran dan fungsi untuk mempertahankan eksistensi bangsa Indonesia dari setiap ancaman dan gangguan, baik dari luar maupun yang timbul di dalam negeri.

IV. 1. Persepsi Ancaman bagi Indonesia

Persepsi Indonesia tentang ancaman adalah setiap usaha dan kegiatan, baik dari luar maupun dari dalam negeri, yang dinilai mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan bangsa. Berdasarkan sifat ancaman, hakikat ancaman digolongkan ke dalam ancaman militer dan ancaman nirmiliter.³ *Ancaman militer* adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. *Ancaman nirmiliter* pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum.⁴

Kedudukan geografis Indonesia di persimpangan antar benua dan antar samudera merupakan kondisi geostrategik yang membawa peluang dan sekaligus ancaman juga.⁵ Indonesia berbatasan dengan 9 negara, dua diantaranya

³ *Ibid.*, hal. 27

⁴ *Ibid.*, hal. 31.

⁵ Kusnanto Anggoro, *Angkatan Udara dan Pertahanan Negara Maritim Indonesia*, (Jakarta: Bahan Suplemen Focus Group Discussion Propatria, 2003), hal. 1.

merupakan perbatasan darat (Papua Nugini dan Malaysia). Dengan semua 9 negara itu Indonesia mempunyai perbatasan laut. Beberapa perbatasan laut merupakan garis pemisah selat sempit, seperti Selat Singapura dan Malaka. Singapura merupakan salah satu pelabuhan udara paling sibuk di dunia.

Dalam hubungan internasional dan pengkajian strategi, keamanan sering ditafsirkan terutama sebagai “kemampuan suatu negara untuk menghadapi ancaman militer dari luar”.⁶ Selama beberapa dasawarsa pandangan seperti itu sangat mewarnai analisis para teoretisi dan praktisi Barat: ancaman bersifat militer, dan berasal dari luar tapal batas suatu negara. Jika terdapat berbagai usaha untuk memperhitungkan ancaman non-militer, pada umumnya sumber ancaman tetap diidentifikasi dari luar.⁷ Klaus Knorr dengan jelas menggambarkan hal itu, ketika mengatakan bahwa “ancaman terhadap keamanan nasional muncul ketika nilai vital atau inti menghadapi ancaman atau tindakan ancaman dari luar”.⁸

Berakhirnya Perang Dingin membawa implikasi luas bagi konsep pertahanan dan keamanan. Dimensi permasalahan mencakup bukan hanya masalah militer, tetapi juga masalah-masalah non-militer. Jessica Tuchman Mathews menganggap bahwa “perkembangan global yang terjadi belakangan ini menjadikan konsep keamanan nasional perlu memperhitungkan dimensi sumber daya alam, lingkungan dan masalah-masalah kependudukan”.⁹ Tickner menambahkan bahwa masalah-masalah ancaman nasional dari dimensi militer, ekonomi, politik dan lingkungan berkaitan satu sama lain.¹⁰ Barry Buzan membuat definisi yang lebih luas. Dalam pandangannya, ancaman terhadap keamanan nasional dapat bersumber dari ancaman militer, politik, sosial, ekonomi

⁶ David Dewitt, “Common, Comprehensive, and Cooperative Security”, dalam *Pacific Review* Vol. 7, No. 1 (1994), hal. 1.

⁷ Kusnanto Anggoro, *Ibid*.

⁸ Klaus Knorr dan Frank N. Trager, eds, *Economic Issues and National Security*, seperti dikutip Dewitt, hal. 12. Knorr memberi perhatian pada dimensi non-militer. Namun, apa yang dianggapnya sebagai core values hanya terbatas pada dimensi ekonomi.

⁹ Jessica Tuchman Mathews, “Redefining Security”, dalam *Foreign Affairs* Vol. 68, No. 2 (Spring 1988), hal. 162.

¹⁰ J. Ann Tickner, “Revisioning Security”, dalam *International Relations Theory Today*, ed. Ken Booth dan Steve Smith (Cambridge: Polity Press, 1995), hal. 194.

dan lingkungan.¹¹ Para ilmuwan itu memasukkan masalah-masalah non-militer dalam skema pengkajian strategis. Sumber ancaman tidak banyak mengalami pemikiran kembali, pada umumnya dan terutama tetap berasal dari luar.¹²

Salah satu asumsi dasar adalah bahwa dengan semakin meningkatnya interdependensi politik dan ekonomi, maka negara-negara akan kurang tertarik berperang satu dengan yang lain.¹³ Interdependensi ekonomi diharapkan mampu meredam potensi konflik militer. Selama ini harapan itu masih harus diuji kebenarannya untuk jangka panjang. Pada kenyataannya, meningkatnya gejala-gejala multilateralisme dalam masalah keamanan dan pertahanan tidak dengan sendirinya menghapus usaha-usaha unilateral. Seperti tertuang dari hasil survey *International Institute for Strategic Studies* (IISS) baru-baru ini, anggaran pertahanan di Asia Pasifik meningkat, suatu indikasi bahwa negara-negara di kawasan ini melakukan modernisasi persenjataan.

Di masa depan kecenderungan itu menjadi semakin besar. Sekurangnya terdapat dua hal penting yang mungkin akan mempertahankan momentum itu. *Pertama*, situasi lingkungan strategis Asia Pasifik masih tetap diwarnai dengan ketidakpastian. Masa depan aliansi Jepang-Amerika, ketidakpastian di Semenanjung Korea, hubungan Cina-Taiwan masih merupakan masalah gawat yang mungkin bermuara pada penyelesaian di medan laga. Mungkin saja pertikaian di medan laga itu tidak akan berkembang menjadi perang besar dan berkepanjangan (*general war*). Namun semua itu tidak menutup kemungkinan terjadinya perang terbatas (*limited war*). *Kedua*, kecenderungan untuk berdikari (*self-reliance*) di tengah berbagai perubahan itu akan memaksa negara-negara mencurahkan perhatian lebih besar bagi modernisasi kekuatan militer. Dengan ditopang oleh dinamisme ekonomi, negara-negara di kawasan ini mempunyai peluang yang relatif *sustainable* untuk tetap mengembangkan kekuatan militer. Jika tidak disertai dengan membaiknya saling pengertian antar

¹¹ Barry Buzan, *People, State and Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era* (London: Harvester Wheatsheaf, 1991), hal. 19-20.

¹² Kusnanto Anggoro. *Ibid.*, hal. 2.

¹³ *Ibid.*

bangsa (*confidence building measures*) hal ini dapat menimbulkan ketegangan-ketegangan yang dapat berkembang menjadi pertikaian militer.¹⁴

Menurut Edy Prasetyono, sumber ancaman yang dihadapi oleh Indonesia dapat dibedakan menjadi dua, yakni dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal:¹⁵

1. Lingkungan Internal

Perkembangan domestik masih menunjukkan beberapa ketidakpastian baik di bidang sosial, ekonomi, maupun politik. Pemulihan ekonomi diperkirakan masih menghadapi beberapa kendala antara lain karena lemahnya iklim investasi, pertumbuhan ekspor yang lamban, dan ketidakpastian hukum dan politik. Jumlah pengangguran dan mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan masih sangat besar. Masalah-masalah ini tidak hanya mengurangi kinerja ekonomi, tetapi juga akan melahirkan ketidakstabilan di kalangan masyarakat akar rumput. Kenaikan BBM yang mencapai lebih dari 100 persen makin memperburuk keadaan di atas.

Dalam beberapa tahun terakhir ini kemampuan negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat juga berkurang. Gejala ini tampaknya akan terus berlangsung. Kelemahan ekonomi dan keuangan negara adalah salah satu penyebab utama dari keadaan ini. Selain itu, pelembagaan politik untuk membangun sistem politik yang demokratis juga masih akan menghadapi berbagai persoalan. Hubungan lembaga-lembaga negara, terutama antara eksekutif dan legislatif tampaknya belum akan mampu melahirkan sistem *checks and balances* yang stabil. Negara juga akan dihadapkan pada tuntutan-tuntutan baru daerah dalam proses desentralisasi di Indonesia. Ketimpangan ekonomi dan masalah-masalah distribusi sumber-sumber ekonomi antara pusat dan daerah akan memperkuat tuntutan-tuntutan seperti itu. Proses ini akan memakan waktu yang lama.

Masalah-masalah di atas melahirkan tantangan terhadap proses reformasi politik di Indonesia. Hakekatnya adalah bahwa politik, baik pelaku maupun proses pelembagaannya, masih menghadapi krisis legitimasi, tidak hanya dalam konteks

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Edy Prasetyono, *Masalah –Masalah Bidang Pertahanan dan Keamanan*, diunduh dari www.propatria.or.id/loaddown/index.php?induk=90 pada tanggal 20 Oktober 2010 pukul 15.40.

hubungan antara negara (*state*) dan masyarakat (*society*), melainkan juga dalam hubungan antara sipil dan militer (*civil-military relations*, CMR). Hubungan sipil-militer yang menundukkan institusi militer di bawah otoritas politik sebagai syarat pembangunan sistem politik yang demokratis masih sering dipahami secara salah. Bermainnya kepentingan-kepentingan kekuasaan dan ekonomi, baik kelompok politik sipil dan militer, menjadikan reformasi hubungan sipil-militer masih akan memakan waktu yang lama. Masalahnya menjadi makin rumit karena para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam masalah hubungan sipil-militer *tidak* menjadikan masalah ini sebagai agenda politik nasional.

Persoalan-persoalan di atas, yaitu menurunnya kemampuan negara, krisis ekonomi, ketidakadilan, ketidakpastian transisi politik, dan masalah hubungan sipil-militer, menunjukkan bahwa Indonesia akan menghadapi masalah-masalah keamanan dalam negeri yang serius.

Ancaman kedua yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah konflik komunal dan gerakan separatis. Konflik komunal lahir tidak hanya karena perbedaan nilai dan budaya, tetapi lebih mendasar adalah karena entitas/masyarakat tidak mampu menemukan bentuk interaksi yang lebih tinggi yang mengatasi ikatan komunal mereka. Masalah ini makin runyam karena masyarakat tidak merasakan kehadiran negara dan bentuk-bentuk ikatan politik dan ekonomi ke mana mereka memberikan loyalitas. Proses politik selama krisis ini tidak mampu mentransformasi konflik-konflik komunal ke dalam bentuk interaksi sosial politik yang terlembaga.

Banyak faktor menjelaskan munculnya separatisme yaitu sejarah, ketimpangan ekonomi dan ketidakadilan politik, dan perasaan dimarginalkan oleh sistem politik dan ekonomi. Masalah ini akan makin rumit karena globalisasi dan keterbukaan menjadikan mereka yang terlibat mempunyai ruang lebih bebas untuk bergerak ke luar batas nasional. Sumber-sumber ekonomi dan finansial menjadi lebih luas dengan adanya kemampuan untuk membentuk jaringan-jaringan internasional yang memberikan mereka akses persenjataan dan dukungan eksternal, baik potensi dukungan resmi, maupun melalui kegiatan-kegiatan ilegal misalnya penyelundupan senjata, obat terlarang, dan kegiatan terorisme.

Bentuk ancaman ketiga yang akan dihadapi oleh Indonesia adalah kerusuhan sosial. Ini akan lahir ketika masyarakat menemui jalan buntu untuk mengatasi krisis, terutama ekonomi dan sosial. Dalam situasi krisis, di mana negara tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, dan bersamaan dengan itu lembaga dan proses politik kehilangan legitimasi, potensi kerusuhan sosial merupakan potensi ancaman yang dihadapi oleh Indonesia. Potensi kerusuhan sosial juga dapat memanfaatkan kerawanan hubungan-hubungan ikatan primordial, terutama agama, yang sangat mudah dimanipulasi. Akhir-akhir ini rasa aman dalam hubungan keagamaan mulai terusik.

Ancaman lain yang juga akan dihadapi adalah terorisme. Dalam kurun waktu 3-4 tahun terjadi serangan bom teroris dalam skala besar. Terorisme yang berkembang di Indonesia mempunyai akar kuat di dalam negeri Indonesia baik karena sejarah, ideologi-politik, lemahnya penegakkan hukum, dan tidak terpenuhinya kepentingan-kepentingan ekonomi dan politik. Keberhasilan jaringan terorisme internasional masuk ke Indonesia lebih banyak ditentukan oleh masalah-masalah domestik di atas. Faktor lain adalah krisis ekonomi dan politik yang memberikan ruang bagi kelompok teroris untuk memberikan jalan alternatif dan mengeksploitasi ketidakpuasan masyarakat terhadap negara. Selain itu, ketidakmampuan negara untuk melakukan kontrol terhadap beberapa aspek yang dengan mudah bisa dimanfaatkan oleh jaringan terorisme, misalnya pengawasan terhadap arus manusia, wilayah maritim dan udara yang sangat terbuka. Yang tidak kalah penting adalah korupsi birokrasi dan aparat keamanan yang memudahkan jaringan teroris untuk menembus institusi-institusi dan perangkat-perangkat keamanan negara dan masyarakat.

2. Faktor Eksternal

Sementara itu aspek eksternal menunjukkan kecil kemungkinan terjadi perang konvensional antar negara di kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang akan mengancam keamanan dan kepentingan Indonesia. Kemungkinan terjadinya invasi militer ke Indonesia juga sangat kecil. Secara ekonomi dan politik, perang dan invasi militer adalah pilihan yang mahal baik dilihat dari

politik domestik maupun dalam hubungan antar bangsa yang akan makin saling tergantung (interdependensi) di mana kepentingan nasional hanya bisa dipenuhi melalui kerjasama internasional. Dalam situasi seperti itu negara dan bangsa akan dihadapkan pada pilihan yang terbatas dalam menentukan kebijakan nasional mereka yang mempersempit kemungkinan lahirnya kebijakan luar negeri dan pertahanan yang agresif.

Meskipun demikian, akan lahir tantangan-tantangan baru yang harus diperhatikan oleh Indonesia. *Pertama*, Amerika Serikat (AS) masih akan mendominasi ekonomi dan politik dunia. Posisi AS dalam sistem internasional dewasa ini belum bisa ditandingi oleh kekuatan lain, bahkan oleh Uni Eropa, apalagi oleh kekuatan-kekuatan regional seperti Brasil, Argentina, Afrika Selatan, India, ASEAN, Jepang, dan China. Perilaku kekuatan-kekuatan ini belum mampu membentuk sistem internasional baru yang menantang supremasi AS.

Dalam posisi seperti itu, perubahan kebijakan dan perilaku Amerika Serikat dipastikan akan mempengaruhi kepentingan Indonesia. Terlebih untuk kawasan Asia Tenggara dan Asia Pasifik yang merupakan kawasan sangat strategis bagi Amerika Serikat. Kehadiran Amerika Serikat di kawasan sekitar Indonesia ini akan tetap menjadi kondisi obyektif dalam perumusan kebijakan keamanan dan pertahanan Indonesia. Masalah-masalah baru internasional, seperti terorisme, keamanan jalur perdagangan, dan masalah-masalah hak azasi manusia akan mewarnai perilaku Amerika Serikat terhadap Indonesia yang sekarang dan dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan diperkirakan belum mampu sepenuhnya mengontrol perkembangan-perkembangan internasional dan domestik.

Kedua, harus juga dicermati bahwa perkembangan-perkembangan ke depan di kawasan Asia Pasifik mengindikasikan bahwa konflik akan lebih banyak berdimensi maritim. Atau, aspek maritim akan membuat konflik menjadi makin kompleks. Penyelundupan manusia, penyebaran aksi terorisme, kejahatan internasional yang lain akan banyak memanfaatkan dimensi laut, terutama di negara-negara yang kemampuan patroli dan pengawasan wilayah lautnya sangat lemah seperti Indonesia. Bahkan ada kaitan yang erat antara terorisme,

separatisme, dan kejahatan trans-nasional yang lain dengan memanfaatkan atau mengeksploitasi jalur-jalur laut di wilayah perairan Indonesia, sehingga mereka bisa bergerak dengan bebas untuk memasuki Indonesia. Ini menunjukkan bahwa keamanan laut tidak hanya strategis dalam hubungan dan politik internasional, melainkan juga strategis bagi keamanan domestik.

Kepentingan negara-negara di kawasan juga akan lebih banyak lahir dari lingkungan maritim, mulai dari perlindungan terhadap jalur komunikasi laut (*SLOC, Sea Lanes of Communication*) dan jalur perdagangan laut (*SLOT, Sea Lanes of Trade*) yang vital bagi perdagangan internasional, jalur pemasok energi, dan ekonomi. Selain itu dimensi maritim juga akan memberikan pilihan-pilihan strategis bagi negara-negara di kawasan ini untuk memproyeksikan kemampuan mereka ke luar batas nasional. Hal ini dilakukan misalnya dengan peningkatan kemampuan patroli atas wilayah laut baik wilayah yurisdiksi maupun wilayah ZEE dan jalur-jalur perdagangan, maupun dengan meningkatkan kekuatan pertahanan dengan prioritas angkatan laut dan udara. Dalam suatu kawasan yang berdimensi maritim sangat kuat, maka hanya negara yang membangun kekuatan maritim yang akan banyak mengendalikan percaturan politik dan strategis di kawasan ini.

Dengan demikian, meskipun upaya untuk memperkuat kekuatan maritim oleh negara-negara Asia Pasifik belum sampai pada tahap persaingan untuk meraih supremasi laut, kecenderungan ke depan tampak jelas bahwa keamanan maritim akan menjadi agenda dan sekaligus masalah yang membentuk kebijakan keamanan dan pertahanan negara-negara di kawasan ini.

Ketiga, dalam sistem internasional yang didominasi oleh Amerika Serikat, kuatnya globalisasi yang membuka kesempatan untuk bersaing, dan kecenderungan pengembangan kekuatan maritim inilah munculnya Cina sebagai kekuatan regional dan global harus dilihat dengan perhitungan yang matang. Artinya, Cina sedang dan akan hadir sebagai tantangan dan sekaligus peluang. Indonesia akan dihadapkan pada dinamika hubungan Cina-Amerika Serikat yang akan ditandai oleh kuatnya upaya Cina untuk menyejajarkan diri dalam kelompok negara besar di kawasan terutama Jepang dan India, mampu bersaing dengan Amerika Serikat, mampu membentuk agenda keamanan dan politik di kawasan

Asia Pasifik, dan mampu memenuhi kepentingan-kepentingan ekonomi nasionalnya yang makin mengandalkan pada keterbukaan ekonomi internasional dan globalisasi. Hampir dapat dipastikan bahwa untuk tujuan-tujuan tersebut Cina akan membuat kebijakan-kebijakan keamanan yang memungkinkannya mempunyai banyak pilihan-pilihan strategis. Oleh karena itu dapat dipahami Cina makin asertif dalam kebijakan luar negerinya yang ditopang dengan pengembangan kekuatan angkatan laut dan udara. Di bidang ekonomi, Cina makin membuka diri dan sekaligus mengikatkan diri dalam kerjasama ekonomi internasional. Cina yang akan datang adalah Cina yang baru yang lebih dinamis, terbuka, dan asertif yang akan hadir di kawasan sekitar Indonesia.

Sebaliknya, Cina yang gagal sebagai negara yang mengalami transformasi besar baik dalam politik domestik dan internasional, juga merupakan skenario yang tidak dapat dikesampingkan. Bahaya disintegrasi dan kesenjangan pusat-daerah, lahirnya gap besar antara kelas menengah baru akibat kemajuan ekonomi dengan masyarakat pedesaan, dan tuntutan demokratisasi yang makin besar akan menjadi tes bagi kelangsungan sistem politik komunis Cina. Tuntutan ini akan menjadi makin kuat karena membiarkan berjalannya sistem ekonomi dan sistem politik yang berbeda justru menciptakan bom waktu perubahan drastis dan tak terkendali. Jika ini terjadi, dipastikan akan terjadi gelombang manusia dan ketidakstabilan kawasan. Meskipun skenario ini kecil kemungkinan terjadi, resiko besar yang harus dihadapi oleh Cina dan negara-negara di kawasan menyebabkan perlu kehati-hatian dalam berhubungan dengan Cina, menekankan perlunya transparansi kebijakan, dan jika perlu kompromi-kompromi tertentu.

Keempat, melemahkan batas fisik nasional membuka ruang berkembangnya jaringan kejahatan trans-nasional. Para pelakunya dapat bergerak relatif bebas terutama di kawasan yang sangat terbuka. Di kawasan Asia Tenggara, hampir semua kejahatan trans-nasional berhasil mengeksploitasi keterbukaan dimensi maritim di kawasan, mulai dari penyelundupan manusia, perdagangan obat terlarang, terorisme, dan penyeludupan senjata ringan. Kerugian ekonomi dan politik-keamanan yang ditimbulkan oleh kejahatan trans-nasional sangat besar. Kejahatan trans-nasional akan melahirkan konflik-konflik baru tidak

hanya antara negara, melainkan juga antara negara dengan aktor bukan-negara (*non-state actors*) yang melampaui batas-batas kedaulatan nasional. Melihat perkembangan-perkembangan saat ini, kecenderungan ke depan menunjukkan bahwa kejahatan trans-nasional akan menjadi lebih besar karena di dalamnya terdapat peluang yang lebih besar bagi para pelaku untuk memenuhi kepentingan-kepentingan mereka melalui beragam interaksi dan saluran. Ini sangat fundamental karena dalam globalisasi negara bukan lagi satu-satunya aktor atau entitas politik yang dapat menuntut loyalitas tunggal dan memenuhi kepentingan warganya. Pelaku bukan negara (*non-state actors*) mempunyai banyak pilihan yang tidak dapat dipenuhi hanya oleh negara. Akibatnya, kejahatan trans-nasional menjadi kecenderungan kuat saat ini dan di masa depan.

Perkembangan internasional ke depan akan diwarnai oleh kesalingtergantungan (*interdependensi*) yang makin kuat. Perkembangan ini membuat hubungan internasional menjadi makin sensitif bahkan melahirkan persepsi kerapuhan (*vulnerability*) terhadap perubahan-perubahan eksternal. Akibatnya, masalah-masalah dalam negeri tidak dapat diisolasi dari masalah-masalah internasional. Batas spasial-geografis menjadi kurang relevan dalam menghadapi interdependensi dan keterbukaan.

Penjabaran mengenai potensi ancaman di atas secara spesifik dapat digunakan untuk memprediksi berbagai ancaman yang akan mungkin timbul dalam kurun 25 tahun mendatang, seperti yang diperlihatkan dalam tabel berikut. Lihat Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rekapitulasi Potensi Ancaman terhadap Kedaulatan NKRI dalam
25 Tahun Mendatang

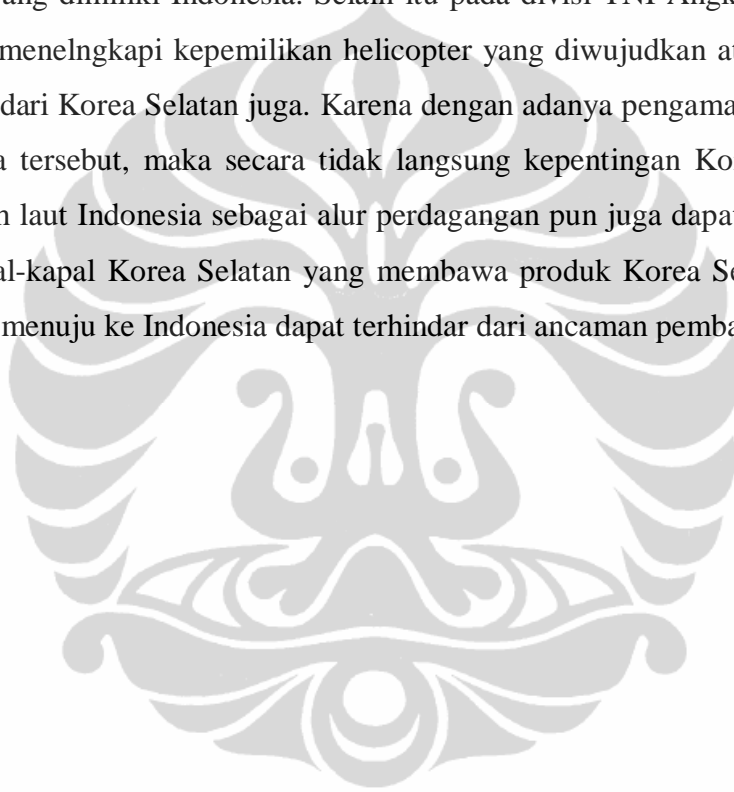
No.	LEVEL ANCAMAN	SUB-LEVEL ANCAMAN	BENTUK ANCAMAN	TIPE ANCAMAN
1	Internasional		Globalisasi Ekonomi	<i>Inter-state</i> (Non-Militer/Hegemoni)
2	Regional	Asia Pasifik	Ekonomi Kesehatan Pekerjaan SARS	<i>Inter-state</i> (Non-Militer/Hegemoni)
		Asia Tenggara	Terorisme Konflik Sparatly Perompakan <i>Human Trafficking</i> Perdagangan Obat Penyelundupan Ekonomi Perbatasan	<i>Transnational</i> <i>Inter-state</i>
3	Nasional		Konflik SARA Separatisme Pengangguran Kemiskinan Bencana Alam Pengungsian <i>Illegal Logging</i> <i>Illegal Fishing</i> Pulau-pulau Kosong	<i>Intra-state</i> (Militer) <i>Inter-state</i> (Non-Militer) <i>Inter-state</i>

Dikutip dari: Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur Ideal TNI Ideal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). Hal. 75.

Dengan luas wilayah dan bentuk geografis Indonesia yang berupa kepulauan menunjukkan bahwa Indonesia sangat rentan akan datangnya ancaman-ancaman dari luar, maka Indonesia membutuhkan dukungan dalam pengamanan kedaulatan wilayahnya, karena dalam menjaga wilayah perairan yang amat luas dibutuhkan armada kapal perang yang memadai. TNI Angkatan Laut mencoba melengkapi kapal-kapal yang dibutuhkan, mulai dari kapal latihan, kapal patroli, kapal bantu, hingga kapal dengan kekhususan menyerang.

Dengan adanya hubungan kerjasama pertahanan yang dijalin oleh Indonesia dengan Korea Selatan merupakan salah satu langkah positif yang

dilakukan kedua negara. Karena melalui mekanisme *joint declaration* yang ditandatangani kedua negara dapat terlihat bahwa Korea Selatan memberikan dukungan yang signifikan bagi pengamanan teritori wilayah laut Indonesia. Sebagai contohnya adalah pemberian pinjaman kredit ekspor dari Korea Selatan kepada Indonesia untuk pemenuhan kebutuhan pertahanan lautnya seperti kelengkapan *marine utility vehicles* dan *maintenance* bagi kapal laut maupun kapal selam yang dimiliki Indonesia. Selain itu pada divisi TNI Angkatan Udara pun semakin menelngkapi kepemilikan helicopter yang diwujudkan atas bantuan kredit ekspor dari Korea Selatan juga. Karena dengan adanya pengamanan teritori laut Indonesia tersebut, maka secara tidak langsung kepentingan Korea Selatan dalam wilayah laut Indonesia sebagai alur perdagangan pun juga dapat terpenuhi, sehingga kapal-kapal Korea Selatan yang membawa produk Korea Selatan yang melewati dan menuju ke Indonesia dapat terhindar dari ancaman pembajakan.



IV. 2. Kapabilitas Pertahanan Indonesia

Kapabilitas pertahanan negara yang dikembangkan untuk mewujudkan Sistem Pertahanan yang bersifat semesta mengintegrasikan kapabilitas pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Kapabilitas pertahanan negara disusun berdasarkan Strategi Pertahanan Negara yang merefleksikan kemampuan, kekuatan, dan gelar kekuatan pertahanan dan sumber daya nasional. Dalam rangka melaksanakan Strategi Pertahanan Negara, kapabilitas pertahanan negara dikembangkan untuk mencapai standar penangkalan, yakni kapabilitas pertahanan negara yang mampu menangkal dan mengatasi ancaman agresi terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan bangsa. Dalam lingkup tersebut, kapabilitas pertahanan negara dikembangkan untuk menghadapi kondisi terburuk berupa perang. Jika kapabilitas pertahanan negara dibangun dengan standar konvensional untuk mampu mempertahankan diri dari agresi, niscaya tugas-tugas pertahanan lainnya akan mampu diemban.

Postur pertahanan adalah gambaran tentang kekuatan pertahanan yang mencakup kemampuan, kekuatan, gelar kekuatan, serta sumber daya nasional.¹⁶ Postur pertahanan dibangun dan dikembangkan sesuai dengan strategi pertahanan yang diterapkan. Postur pertahanan pada hakekatnya adalah wujud fisik dari sistem dan upaya pertahanan negara yang mencakup kekuatan, kemampuan, serta pengeluaran pertahanan militer¹⁷ dan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.

Komponen postur pertahanan Indonesia mencakup baik aspek militer maupun aspek nir-militer. Postur pertahanan dibentuk dan dikembangkan berdasarkan pada doktrin dan strategi pertahanan dengan memperhatikan geopolitik dan geostrategi Indonesia sebagai negara kepulauan yang luas dan terbuka. Dengan karakteristik strategi seperti itu, postur pertahanan Indonesia harus mampu menghadapi berbagai macam ancaman pertahanan. Intinya, pembangunan postur pertahanan Indonesia akan diarahkan untuk membentuk

¹⁶ Edy Prasetyono, "Strategi Pertahanan Indonesia di Masa Depan", dalam *Analisis CSIS*, Vol. 37, No. 3 (September 2010), hal. 358.

¹⁷ Pertahanan militer diorganisasikan ke dalam Komponen Utama, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

kemampuan penangkalan standar (*standart deterrence*) yang diukur dari kemampuan untuk melakukan peperangan konvensional melawan setiap agresi yang mengancam Indonesia dengan menggunakan kekuatan pertahanan militer dan nir-militer.

Secara universal, postur pertahanan hampir semua negara dirancang untuk dapat melakukan fungsi penangkalan atau mempunyai daya tangkal dan mampu menjalankan peperangan. Oleh karena itu, postur pertahanan harus dirancang atas dasar pertahanan eksternal yang dirumuskan dalam penerapan strategi pertahanan tertentu. Kekuatan pertahanan yang kredibel tidak pernah lahir dari pertimbangan kemampuan untuk menghadapi konflik internal. Kekuatan pertahanan yang dirancang untuk menghadapi kekuatan eksternal sebagai basis pertahanan mempunyai fleksibilitas lebih tinggi dan dapat dikerahkan untuk mengatasi konflik internal. Sebaliknya, kemampuan yang dirancang untuk menghadapi konflik atau ancaman internal tidak akan mampu menghadapi ancaman militer eksternal, terutama jika ancaman militer eksternal tersebut menerapkan strategi penguasaan atau penghancuran *center of gravity* pertahanan negara.

Menurut Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia 2008, perancangan kapabilitas pertahanan negara didasarkan atas enam faktor utama:

Pertama, perkiraan ancaman terhadap Indonesia dan segala kepentingannya, yakni ancaman yang menjadi domain fungsi pertahanan, termasuk tugas-tugas pelibatan pertahanan yang sah.

Kedua, Strategi Pertahanan Negara yang menyinergikan pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter sebagai satu kesatuan pertahanan negara yang utuh dan menyeluruh.

Ketiga, tingkat penangkalan yang memenuhi standar penangkalan agar dapat menangkal ancaman yang diperkirakan.

Keempat, tingkat probabilitas kerawanan tertinggi bagi Indonesia yang menjadi sumber-sumber ancaman atau sumber-sumber konflik di masa datang.

Kelima, luas wilayah dan karakteristik geografi Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau dengan wilayah perairan yang luas dan terbuka.

Keenam, kemampuan rasional negara dalam membiayai pertahanan negara, termasuk dalam pembangunan kapabilitas pertahanan negara dengan tidak mengorbankan sektor-sektor lain.

Kapabilitas pertahanan dapat diindikasikan dengan sumber daya material yang dimiliki suatu negara yang dapat ditransformasikan ke dalam kekuatan militer. Tiga hal utama yang menjadi alat untuk menganalisa kapabilitas pertahanan suatu negara menurut Jasjit Singh diistilahkan menjadi *3M Paradigm (Manpower, Machine and Money)*.¹⁸ Bagian ini akan menganalisa kapabilitas pertahanan yang dimiliki Indonesia dengan melihat elemen utama dari kapabilitas pertahanan tersebut.

IV. 2. 1. Manpower

Manpower merupakan salah satu elemen utama untuk mengukur kapabilitas pertahanan suatu negara. Secara spesifik hal yang penting untuk dilihat adalah jumlah dari angkatan bersenjata. Angkatan bersenjata Indonesia diorganisasikan ke dalam tiga komponen utama, yakni Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Tugas TNI meliputi operasi militer untuk perang, dan operasi militer di masa damai, meliputi:¹⁹

- 1) Mengamankan obyek vital yang bersifat strategis
- 2) Mengamankan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarganya
- 3) Membantu tugas pemerintahan daerah
- 4) Membantu Polri dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang
- 5) Membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala negara dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia

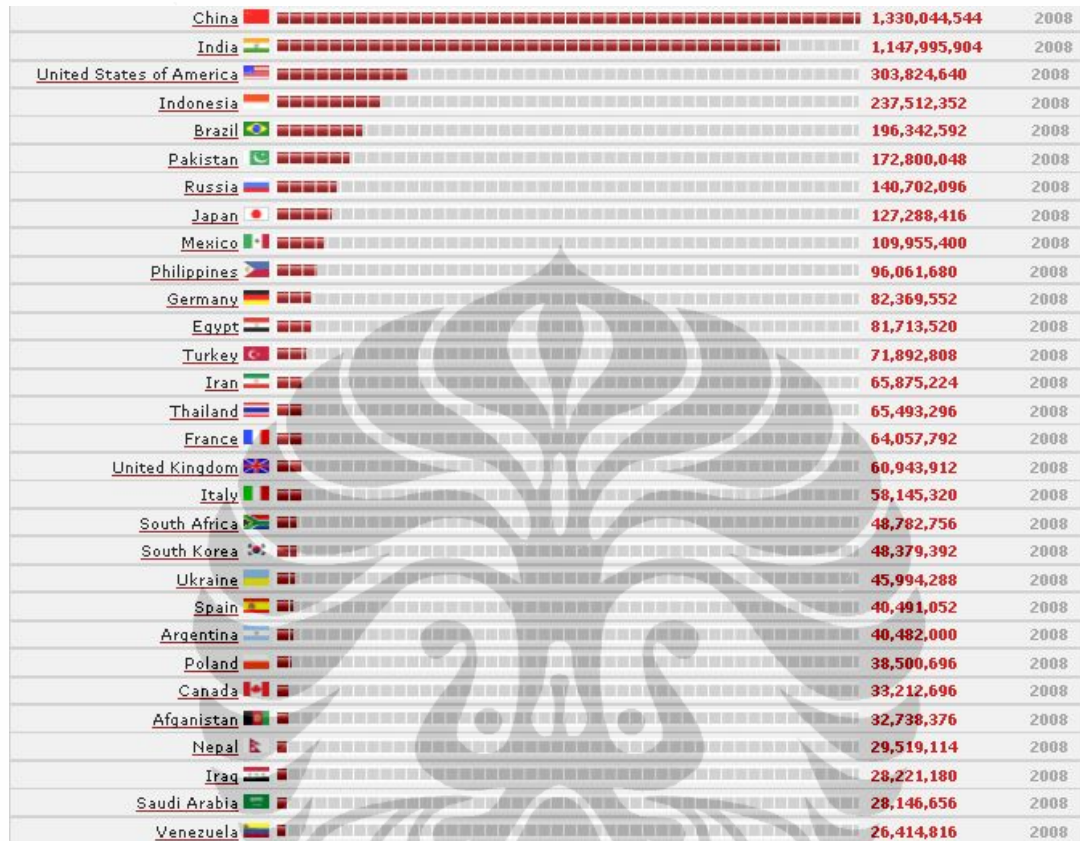
¹⁸ Jasjit Singh, "Planning Military Power for the Future", dalam *Air Power Journal* Vol. 2, No. 4 Winter 2005 (October-December), New Delhi: Center for Air Power. Hal. 57, diunduh dari <http://www.aerospaceindia.org/Journals/Winter%202005/Planning%20Military%20Power%20for%20the%20Future.pdf>

¹⁹ H.S. Kirbiantoro dan Dody Rudianto, *Rekonstruksi Pertahanan Indonesia: Potensi, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Golden Terayon Press, 2010), hal. 157.

- 6) Mengatasi gerakan separatis bersenjata
- 7) Mengatasi pemberontakan bersenjata
- 8) Mengatasi aksi terorisme
- 9) Mengamankan wilayah perbatasan
- 10) Melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai kebijakan politik luar negeri
- 11) Memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukung secara dini sesuai sistem pertahanan semesta
- 12) Membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan
- 13) Membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*)
- 14) Membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perampokan dan penyelundupan

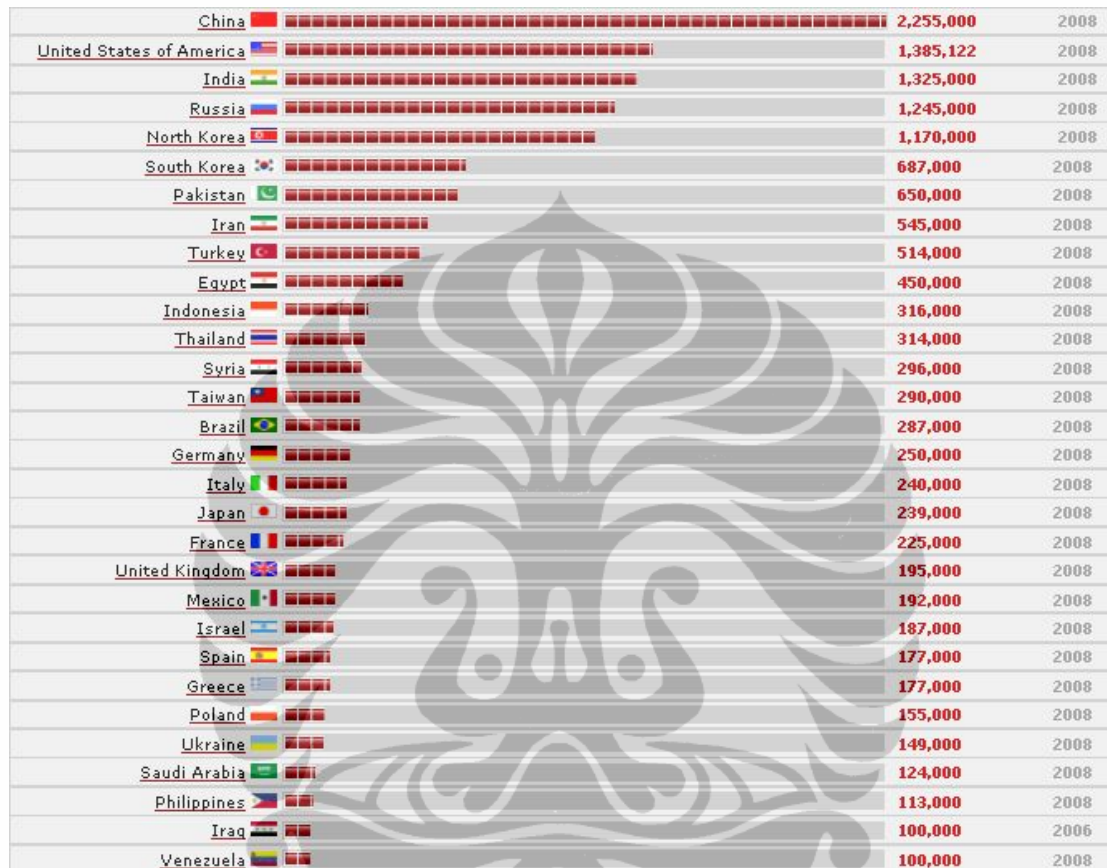
Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk negara-negara lain, Indonesia merupakan negara urutan keempat dalam peringkat jumlah penduduk terbesar di dunia (Lihat Grafik 4.1). Namun jika melihat jumlah dari personel aktif dalam angkatan bersenjata, Indonesia berada pada urutan ke-11. Lihat Grafik 4.2.

Grafik 4.1
Peringkat 30 Besar Jumlah Populasi Negara



Sumber: *Total Population by Country*, diunduh dari
<http://globalfirepower.com/total-population-by-country.asp>

Grafik 4.2
Peringkat 30 Besar Negara dengan Jumlah Personel Aktif Angkatan
Bersenjata



Sumber: *Active Military Manpower*, diunduh dari <http://globalfirepower.com/active-military-manpower.asp>

Dua grafik di atas menunjukkan bahwa dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, Indonesia masih belum mampu menunjukkan pemanfaatan sumber daya manusia yang dimiliki untuk memperkuat kapabilitas pertahanannya. Hal itu terlihat dengan jumlah personel aktif angkatan bersenjata yang dimiliki oleh Indonesia hanya berada di peringkat ke-11 sekitar 0,13% dari jumlah keseluruhan penduduknya, yang seharusnya masuk ke lima besar jumlah *manpower* untuk mencapai titik potensialnya.

Dengan adanya kerjasama pertahanan antara Indonesia dengan Korea Selatan juga memberi pengaruh pada kualitas bagi personil tentara yang dimiliki oleh Indonesia. Hal ini terwujud dengan adanya studi banding atau pertukaran

tentara untuk melakukan pendidikan dan pelatihan di antara kedua negara (sekolah staf komando). Program pelatihan tersebut memiliki tujuan agar meningkatkan profesionalitas dari tentara Indonesia dan untuk menjajaki adanya berbagai kemungkinan pembentukan kerjasama pertahanan di sektor lainnya.

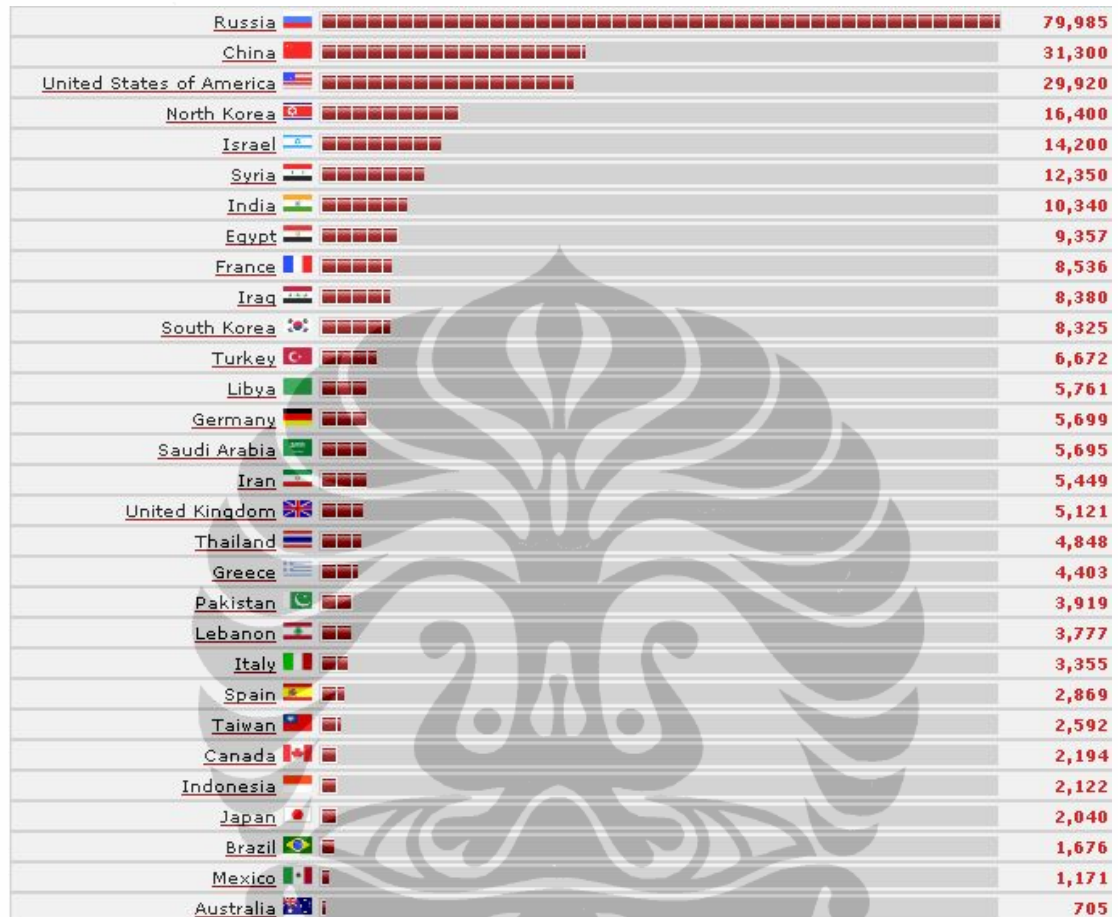
IV. 2. 2. *Machine*

Machine yang dimaksud sebagai elemen utama untuk mengukur kapabilitas pertahanan adalah *military equipment* atau peralatan militer atau alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Menilik dari jumlah dan macam sistem teknologi pertahanan yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI), baik Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut, maupun Angkatan Udara (AU), kemampuan operasionalnya saat ini masih jauh dari memadai bila dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Dari segi jumlah, TNI AD, AL dan AU hanya memiliki peralatan pertahanan terutama Alutsista dengan jumlah sangat terbatas dan fungsinya kurang maksimal karena tidak sesuai dengan perkembangan teknologi.

Bila dibandingkan dengan negara-negara lain, Indonesia merupakan negara yang menempati urutan peringkat ke-26 dalam daftar kepemilikan senjata darat negara-negara di dunia. Lihat Grafik 4.3.

Grafik 4.3
30 Besar Negara dengan Jumlah Senjata Darat

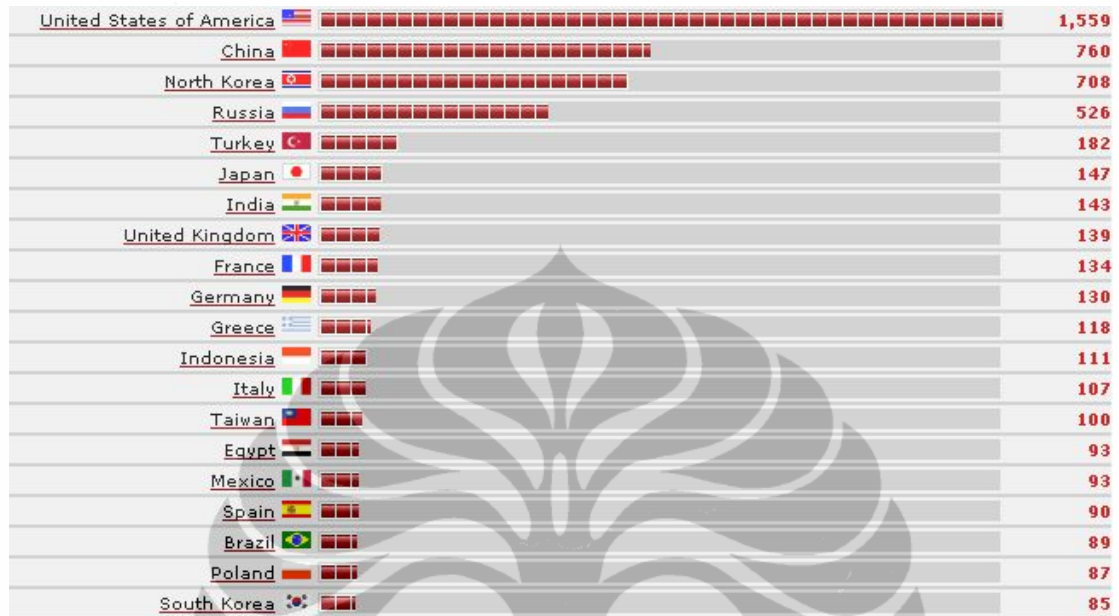


Sumber: *Total Land-Based Weapons*, diunduh dari <http://globalfirepower.com/landbased-weapons-total.asp>

Sedangkan dalam kepemilikan kapal laut oleh angkatan laut, Indonesia berada pada urutan peringkat ke-12 dalam daftar 20 besar negara dengan jumlah kapal laut. Lihat Grafik 4.4.

Grafik 4.4










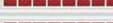


















































20 Besar Negara dengan jumlah Kapal Laut



Sumber: *Navy Ships*, diunduh dari <http://globalfirepower.com/navy-ships.asp>

Dan dalam kepemilikan kapal selam oleh angkatan laut, Indonesia berada pada peringkat ke-28 dalam daftar 20 besar negara dengan jumlah kapal laut. Lihat Grafik 4.5.

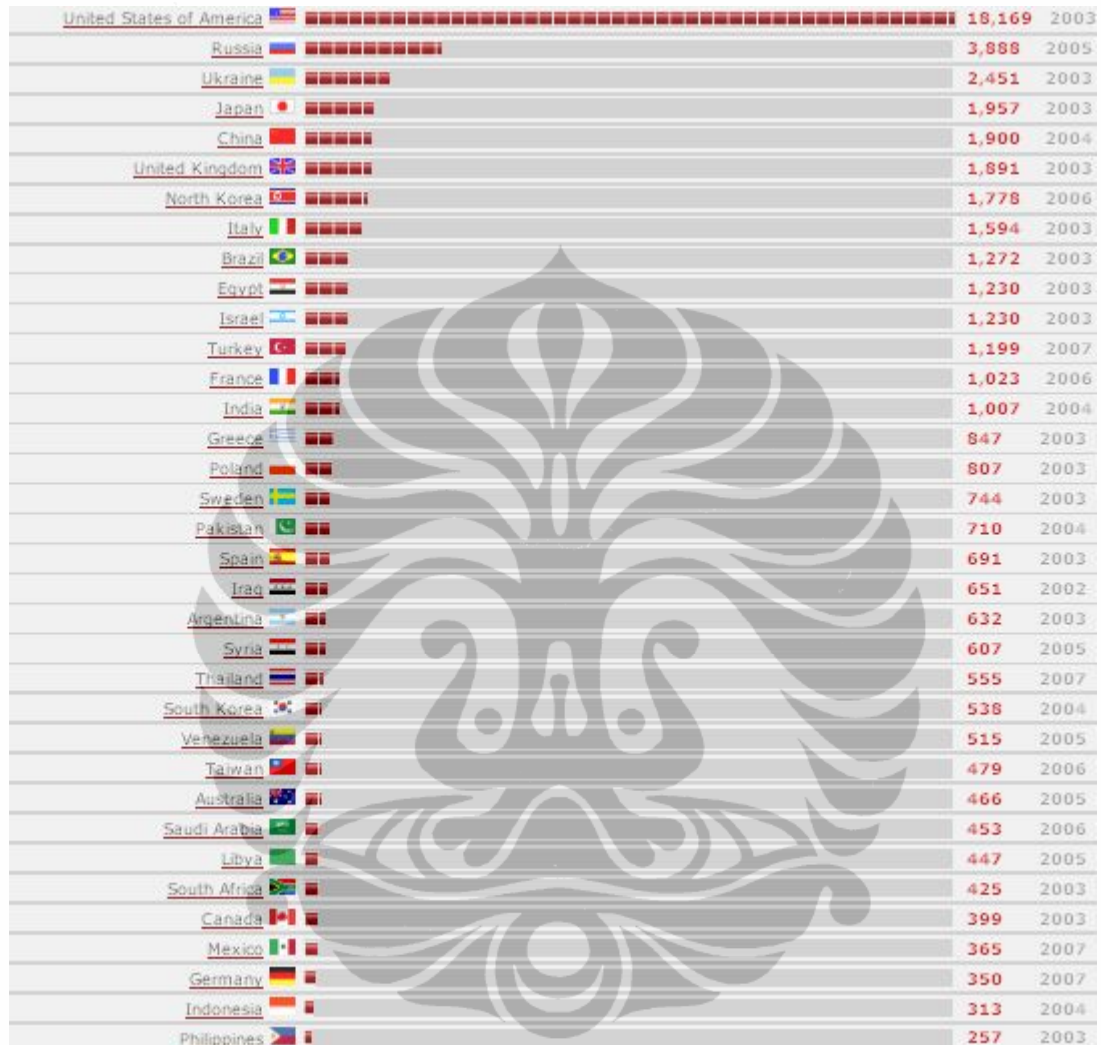
Grafik 4.5
30 Besar Negara dengan Jumlah Kapal Selam

United States of America			75	2008
China			68	2004
Russia			61	2005
South Korea			20	2004
India			18	2004
Japan			18	2008
United Kingdom			17	2008
Turkey			13	2007
Germany			13	2007
Pakistan			11	2004
France			10	2006
Sweden			9	2008
Greece			8	2008
Spain			8	2008
Italy			7	2008
Australia			6	2005
Norway			6	2008
Brazil			5	2008
Egypt			4	2008
Denmark			4	2008
Poland			4	2008
Taiwan			4	2006
Canada			4	2008
Argentina			3	2008
Iran			3	2006
Israel			3	2008
South Africa			3	2008
Indonesia			2	2004
Venezuela			2	2008
Ukraine			1	2008

Sumber: Navy: Submarines, diunduh dari <http://globalfirepower.com/navy-submarines.asp>

Dan dalam kepemilikan *aircraft*, Indonesia berada pada peringkat ke-34 dalam daftar 35 besar negara dengan jumlah kapal laut. Lihat Grafik 4.6.

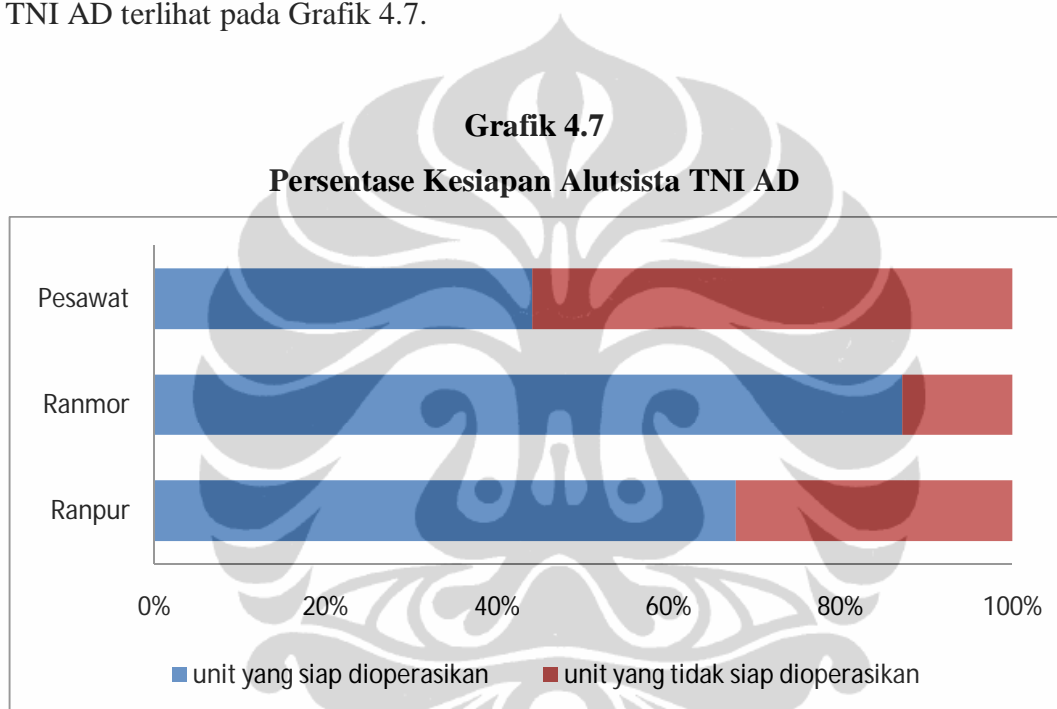
Grafik 4.6
35 Besar Negara dengan jumlah Aircraft



Sumber: *Aerial-Based Weapons Total*, diunduh dari <http://globalfirepower.com/aircraft-total.asp>

Untuk lebih jelasnya lagi melihat postur kekuatan TNI, adalah dengan mengkaji postur TNI sebagai elemen penting dari kekuatan pertahanan Indonesia. Dengan melihat gambaran kemampuan tempur alutsista TNI maka dapat terlihat pula kemampuan yang dimiliki pertahanan Indonesia untuk menghadapi ancaman strategis dari seluruh wilayah tanah, air maupun udara.

Kapabilitas alutsista yang dimiliki TNI AD diantaranya adalah:²⁰ kekuatan Kendaraan Tempur (Ranpur) sejumlah 934 unit, yang siap dioperasikan hanya sebesar 634 unit atau sebanyak 67,8%. Sedangkan Kenadaraan Bermotor (Ranmor), sebanyak 59.842 unit, yang siap dioperasikan hanya 52.165 unit (87,17%). Sedangkan untuk pesawat terbang, dari 59 unit hanya sebanyak 26 atau sebesar 44,06% yang siap operasi. Untuk lebih jelasnya dari kesiapan alutsista TNI AD terlihat pada Grafik 4.7.



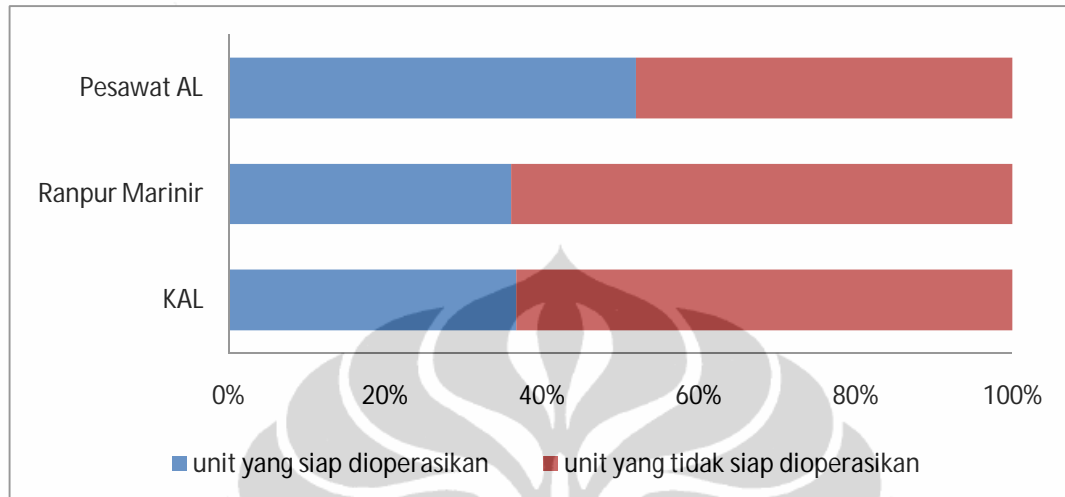
Diolah dari: Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur Ideal TNI Ideal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). Hal. 104-105.

Kapabilitas alutsista yang dimiliki TNI AL diantaranya adalah:²¹ dari sebanyak 207 unit Kapal Angkatan Laut (KAL) dari beberapa jenis, yang siap operasi hanya sebanyak 76 unit atau hanya sebesar 36,7%. Sedangkan dari sebanyak 435 unit Ranpur Marinir dari berbagai jenis, hanya sebesar 157 unit yang siap dioperasikan atau hanya sebesar 36,09%. Pesawat udara yang dimiliki TNI AL yang berjumlah 75 unit, hanya 52% dari jumlah tersebut yang dioperasikan atau sebanyak 32 unit pesawat udara. Lihat Grafik 4.8.

²⁰ Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). Hal. 105.

²¹ *Ibid.* Hal. 109.

Grafik 4.8
Persentase Kesiapan Alutsista TNI AL

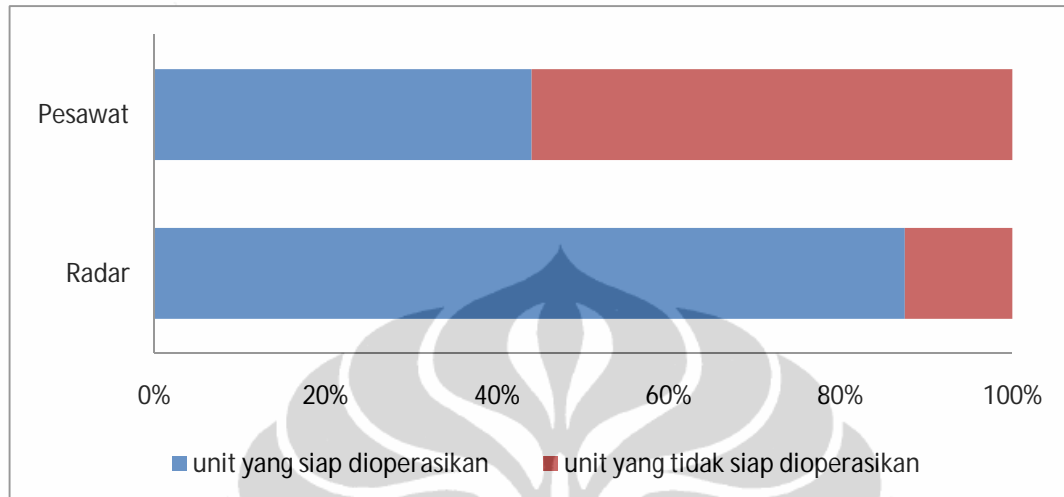


Diolah dari: Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur Ideal TNI Ideal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). Hal. 109-110.

Sedangkan kapabilitas alutsista yang dimiliki TNI AU adalah:²² jumlah radar yang dimiliki TNI AU hanya ada sebanyak 16 unit dengan kesiapan operasi hanya 14 unit atau 87,5% dan dalam rangka pemantapan kemampuan pesawat TNI AU dalam mempertahankan wilayah udara nasional, baik satuan tempur maupun satuan angkut, saat ini hanya didukung oleh 107 unit pesawat dari berbagai jenis dari sebanyak 246 unit pesawat yang dimiliki. Artinya, di samping rendahnya kekuatan radar dalam menjaga wilayah udara nasional, kesiapan operasi pesawat TNI AU pun tidak lebih dari 44%. Lihat Grafik 4.9.

²² *Ibid.*, hal. 114.

Grafik 4.9
Persentase Kesiapan Alutsista TNI AL



Diolah dari: Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur Ideal TNI Ideal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). Hal. 113-114.

Melihat kapabilitas Matra Darat, Laut dan Udara yang telah digambarkan pada grafik diatas menunjukkan bahwa kekuatan alutsista yang dimiliki oleh TNI sangat lemah dan tidak efektif. Karena jika melihat kondisi alutsista TNI yang sebagian besar usianya antara 25-40 tahun, dan ini yang harus dipelihara dan diperbaiki agar siap dioperasikan, maka bisa dikatakan bahwa postur kapabilitas alutsista TNI masih jauh dari standar dan belum memenuhi kebutuhan bagi kepentingan pertahanan Indonesia.

Dengan kekurangan alutsista yang dimiliki oleh pertahanan Indonesia tersebut, maka dengan ditandatanganinya *joint declaration* antara Indonesia dan Korea Selatan dapat menjadi jalan atau upaya untuk pemenuhan kepentingan pertahanan Indonesia dengan tujuan meningkatkan kapabilitas pertahanannya. Contoh empiriknya adalah dengan pemberian hibah alat pertahanan dari Korea Selatan kepada Indonesia menunjukkan eratnya hubungan bilateral di bidang pertahanan di antara kedua negara. Dengan kata lain bahwa *joint declaration* tersebut memberikan pengaruh yang signifikan bagi kepentingan pertahanan Indonesia, termasuk didalamnya kepentingannya dalam hal pemenuhan *defense capability*.

IV. 2. 3. *Money*

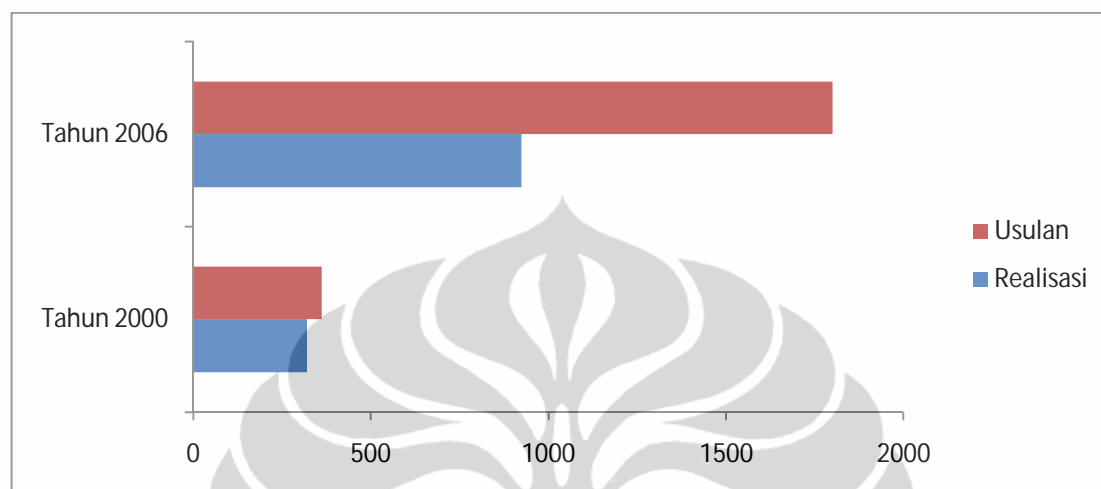
Money yang dimaksud sebagai elemen utama untuk mengukur kapabilitas pertahanan adalah anggaran pertahanan, yang merupakan ukuran atau nilai sumber daya yang diberikan oleh pemerintah kepada angkatan bersenjata. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah ini digunakan untuk memenuhi biaya pengelolaan ataupun peningkatan kapabilitas pertahanannya.

Kondisi nyata postur kekuatan TNI pada tahun 2006 pada dasarnya sudah sesuai dengan target yang harus dicapai pada akhir program lima tahun pertama, 2000-2005, namun hanya pada sisi jumlah tentara (*manpower*). Tetapi pada saat bersamaan terdapat pula catatan bahwa pemenuhan materiil dan alutsista yang ditargetkan dapat mencapai 70% belum bisa terpenuhi, dan ini sangat berkaitan dengan anggaran negara.

Dari data anggaran TNI AD sejak tahun 2000 sampai tahun 2006 pada setiap tahunnya mengalami kenaikan, namun presentase pertumbuhannya berbanding terbalik dengan presentase jumlah anggaran yang diterima terhadap jumlah yang diajukan (penurunan sekitar 3% per tahun).²³ Pada tahun 2006 saja, sebenarnya kebutuhan ideal TNI AD sebesar US\$ 1,8 miliar namun dari jumlah anggaran yang direncanakan tersebut, yang diterima TNI AD hanya sebesar US\$ 925 juta atau memiliki kekurangan dari 52%. Kondisi terbalik jauh berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2000 di mana realisasi anggaran (US\$ 320 juta) dengan usulan tidak jauh berbeda (US\$ 362 juta) atau memiliki kekurangan hanya sebesar 12%. Untuk lebih rincinya lihat Grafik 4.10 di bawah ini.

²³ *Ibid.*, hal. 105.

Grafik 4.10
Perbandingan Usulan dan Realisasi Anggaran TNI AD antara Tahun
Anggaran 2000 dengan Tahun Anggaran 2006 (dalam US\$ juta)

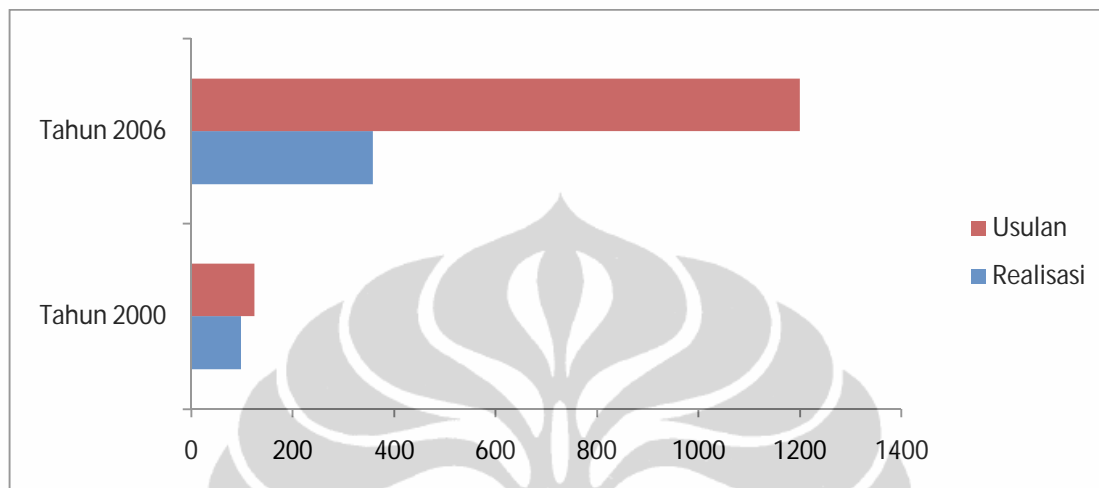


Diolah dari: Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur Ideal TNI Ideal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). Hal. 105-106.

Kondisi alokasi anggaran yang diberikan kepada TNI AD ternyata tidak jauh berbeda dengan alokasi anggaran yang diterima oleh TNI AL. Anggaran yang diterima TNI AL mengalami kenaikan rata-rata sekitar 18% per tahun sejak 2000, namun persentase pertumbuhannya yang rata-rata 18% tersebut berbanding terbalik dengan persentase jumlah anggaran yang diajukan (penurunan sekitar 8% per tahun).²⁴ Pada tahun 2006 saja, sebenarnya kebutuhan ideal TNI AL sebesar US\$ 1,2 miliar namun dari jumlah anggaran yang direncanakan tersebut, yang diterima TNI AL hanya sebesar US\$ 358 juta atau memiliki kekurangan sekitar 70%. Kondisi ini berbeda jika dibandingkan dengan tahun 2000 dimana realisasi anggaran (US\$ 98 juta) dengan usulan yang diajukan tidak jauh berbeda (US\$ 124 juta) atau memiliki kekurangan hanya sebesar 21%. Lihat Grafik 4.11.

²⁴ *Ibid.*, hal. 110-111.

Grafik 4.11
Perbandingan Usulan dan Realisasi Anggaran TNI AL antara Tahun
Anggaran 2000 dengan Tahun Anggaran 2006 (dalam US\$ juta)

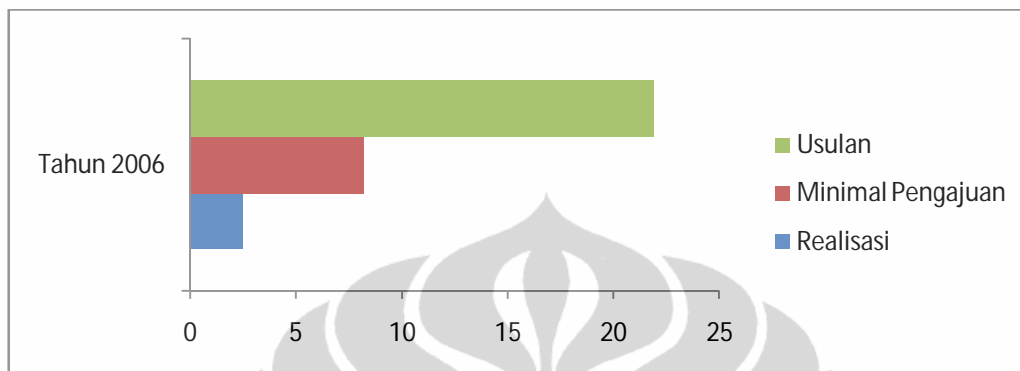


Diolah dari: Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur Ideal TNI Ideal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). Hal. 110-111.

Masalah yang dihadapi TNI AU tidak berbeda jauh dengan yang dihadapi oleh TNI AD maupun TNI AL pada anggaran pertahanannya. Data anggaran TNI AU yang sejak tahun 2001 sampai 2006 diketahui bahwa persentase kenaikan anggaran TNI AU sebenarnya berbanding terbalik dengan persentase jumlah anggaran yang diterima terhadap sejumlah yang diajukan. Pada tahun 2006, kebutuhan ideal TNI AU sebesar Rp. 21,904 triliun dan kebutuhan minimal yang diajukan sebesar Rp. 8,214 triliun, namun dari jumlah anggaran yang direncanakan tersebut, yang diterima TNI AU hanya sebesar Rp. 2,5 triliun atau memiliki kekurangan lebih dari 200%.²⁵ Lihat Grafik 4.12.

²⁵ *Ibid.*, hal. 115.

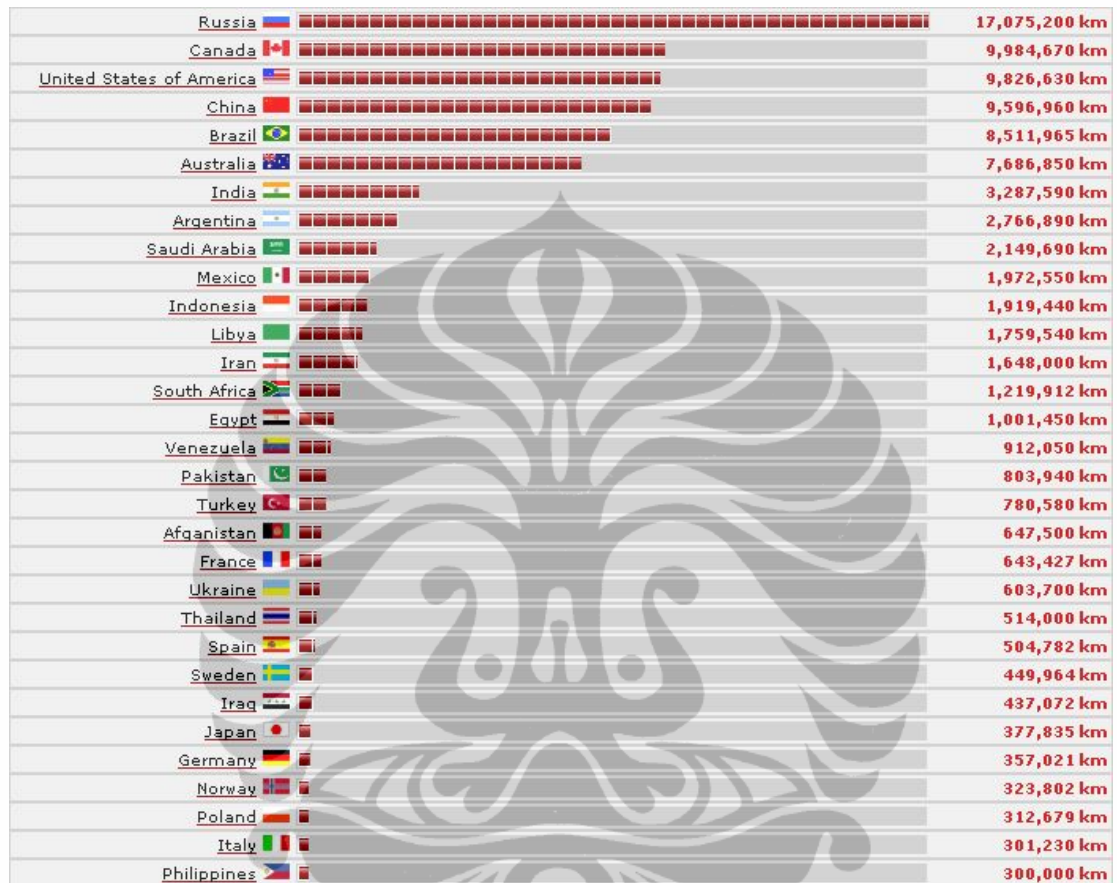
Grafik 4.12
Usulan dan Realisasi Anggaran TNI AU Tahun Anggaran 2006
(dalam triliun rupiah)



Diolah dari: Connie Rahakundini Bakrie, *Pertahanan Negara dan Postur Ideal TNI Ideal*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007). Hal. 115.

Sedangkan dalam hal luas wilayah bila dibandingkan dengan anggaran pertahanan negara lain, posisi Indonesia tidak berbanding lurus dengan luas wilayah yang harus di-*cover* oleh kapabilitas pertahanannya. Pada tahun 2008, luas wilayah daratan Indonesia sebesar 1.919.440 km, berada pada posisi ke-11 dalam peringkat 30 besar luas wilayah daratan (*square land area*) negara-negara di dunia, sedangkan anggaran yang dialokasikan pemerintah Indonesia untuk angkatan bersenjata sebesar US\$ 4,740 juta, dimana Indonesia berada pada posisi ke-29 dalam peringkat jumlah anggaran pertahanan negara-negara di dunia. Selengkapnya lihat perbandingan antara Grafik 4.13 dengan Grafik 4.14 di bawah ini.





























































Grafik 4.13
Peringkat 30 Besar Luas Wilayah Daratan Negara di Dunia
(dalam kilometer)



Sumber: *Square Land Area by Country (in Kilometers)*, diunduh dari <http://globalfirepower.com/square-land-area.asp>

Grafik 4.14

Peringkat 30 Besar Negara dengan Jumlah Anggaran Pertahanan

United States of America			\$515,400,000,000	2009
France			\$61,571,330,000	2008
China			\$59,000,000,000	2008
United Kingdom			\$53,148,770,000	2008
Germany			\$45,930,000,000	2008
Japan			\$44,300,000,000	2005
Russia			\$43,200,000,000	2008
Italy			\$40,050,000,000	2008
India			\$32,350,000,000	2006
Saudi Arabia			\$31,255,000,000	2006
Turkey			\$30,936,000,000	2009
South Korea			\$25,500,000,000	2007
Brazil			\$24,400,000,000	2008
Australia			\$22,000,000,000	2009
Canada			\$19,500,000,000	2009
Israel			\$18,700,000,000	1999
Iraq			\$17,900,000,000	2008
Spain			\$17,700,000,000	2009
Poland			\$11,800,000,000	2009
Taiwan			\$10,500,000,000	2008
Greece			\$9,350,000,000	2007
Venezuela			\$7,700,000,000	2004
Sweden			\$7,000,000,000	2008
Iran			\$6,300,000,000	2007
Norway			\$6,200,000,000	2007
Mexico			\$6,070,000,000	2006
North Korea			\$5,500,000,000	2005
Thailand			\$5,000,000,000	2009
Indonesia			\$4,740,000,000	2008
Pakistan			\$4,260,000,000	2006

Sumber: *Military Defense Spending and Budgets by Country*, diunduh dari <http://globalfirepower.com/defense-spending-budget.asp>

Dari beberapa data, grafik dan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran yang dialokasikan pemerintah Indonesia untuk angkatan bersenjata belum mampu menutupi segala kebutuhan pertahanannya untuk melindungi kedaulatan wilayahnya dan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanannya.

Bila dianalisis dengan penandatanganan *joint declaration* antara Indonesia dengan Korea Selatan, tentu saja memberikan pengaruh juga bagi kepentingan anggaran pertahanan Indonesia. Meskipun mekanisme pinjaman-pinjaman untuk pemenuhan peralatan pertahanan yang diberikan Korea Selatan kepada Indonesia sudah ada sebelum ditandatanganinya *joint declaration* tersebut, namun setelah penandatanganan masih terlihat pola-pola bantuan tersebut. Mekanisme bantuan

melalui kredit ekspor mendominasi bentuk kerjasama pertahanan kedua negara, selain itu ditemukan mekanisme *defense offset* yang dapat meningkatkan hubungan dan teknologi industri kedua negara. Bentuk-bentuk mekanisme yang terjalin antara Indonesia dan Korea Selatan tersebut menjadi salah satu solusi bagi kepentingan pertahanan Indonesia di sektor anggaran. Selain mengurangi beban biaya belanja, juga mempermudah proses transfer teknologi dari kedua negara.

IV. 3. Kepentingan Pertahanan Indonesia terhadap Korea Selatan

Indonesia memiliki sejarah yang tidak terlalu mulus dalam pemenuhan peralatan militer yang dibutuhkan untuk peningkatan kapabilitas pertahanannya. Hal ini terlihat dari tekanan politik dari negara-negara industri maju (terutama Amerika Serikat) yang berbentuk embargo senjata (*arms embargoes*) yang dikarenakan oleh adanya isu pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur pada tahun 1990-an. Dengan adanya embargo tersebut Indonesia menjadi negara dengan kebutuhan akan peralatan pertahanan yang tinggi menjadi terbatas dalam pemenuhan kebutuhan pertahanannya. Meskipun pemerintah Indonesia membangun kebijakan strategis dalam rangka mengembangkan dan memodernisasi peralatan kekuatan Alutsista TNI dengan menggunakan produksi dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan peralatan pertahanan. Sudah ada beberapa perusahaan yang berupa produksi industri pertahanan yang kompetitif di Indonesia, yaitu PT Dirgantara Indonesia (PT DI), PT Pindad, PT PAL Indonesia. Namun, hal tersebut dirasa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pertahanan Indonesia.

Alasan mengapa Indonesia memutuskan untuk melakukan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan adalah karena Korea Selatan merupakan pilihan yang sangat menarik disebabkan atas posisinya sebagai negara yang dekat dengan Amerika Serikat. Hal inilah yang menjadi pertimbangan bagi Indonesia untuk melakukan kerjasama pertahanan dengan Korea Selatan, diharapkan Korea Selatan dapat mendekatkan kembali hubungan pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, dengan kata lain dapat membuka diplomasi pertahanan antara Indonesia dengan Amerika Serikat yang sebelumnya tidak terlalu baik.

Sehingga diharapkan Indonesia tidak lagi menjadi negara yang akan dipolitisasi Amerika Serikat dalam usahanya untuk pemenuhan peralatan pertahanannya dan bahkan bisa menjadi negara yang dapat bekerja sama dalam memenuhi kebutuhan pertahanannya.

Motif dari tujuan kerjasama pertahanan Indonesia dengan Korea Selatan yang berupa sebagai penghubung (*link*) dengan Amerika Serikat juga meneruskan pada motif kepentingan pertahanan Indonesia yang lain, yaitu Korea Selatan juga dianggap Indonesia sebagai negara penyuplai peralatan pertahanan yang aman, terutama untuk pemenuhan kapabilitas pertahanan ofensif Indonesia. Karena dengan adanya kedekatan Korea Selatan dan Amerika Serikat, membuat usaha Indonesia untuk meningkatkan kapabilitas pertahanannya tidak dicurigai oleh Amerika Serikat sebagai sebuah ancaman terhadap eksistensi hegemoninya dalam politik internasional, terutama di bidang pertahanan.

